

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57)

Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000:140):

a. Akumulasi modal

Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dari pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berhubungan dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

2.2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

Sadono Sukirno (2005:12) Mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain.

Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2008).

Hasil penghitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, pertama PDRB berdasarkan harga berlaku (nominal) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Kedua yaitu PDRB berdasarkan harga konstan (riil) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Sukirno (2002:23) Cara menghitung PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan
- i. Jasa- jasa

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung berdasarkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

2.3. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Tambunan (2006:34) yang menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD):

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.. Dengan kata lain Pajak Daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah. Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak.

Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah yaitu :

- 1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 2 Jenis Pajak Dearah Tingkat II terdiri dari : Pajak hotel dan restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan dan lain sebagainya.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Suparmoko (1999:94) Bahwa sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran

retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian Laba, Deviden, dan Penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.4. Pengeluaran Pembangunan

yaitu Pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2003 Pengeluaran Pembangunan adalah proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.

Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbetuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bedungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. pelaksanaan belanja pembangunan dirinci kedalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi kedalam sub sektor, masing-masing sub sektor dirici kedalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi kedalam bagian anggaran (Said Hamid Hasan, 1994: 235).

Moh. Arsjad Anwar, (1986 : 69) Menyatakan bahwa Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kreteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja.

Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari wilayahnya dan dalam istilah ini yang paling sering disebut pembangunan wilayah.

2.5. Hubungan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Boediono (2009:24) Mengatakan Pertumbuhan ekonomi adalah Proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Dan Pendapatan Asli Daerah ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hariato (2007) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pemelanaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sangat berkaitan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap keuangan daerah, karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan pemerintah. Dan sebaliknya pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh terhadap keuangan daerah.

Brata (2004:67) Mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memafaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah kehubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya.

2.6. Hubungan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. seperti: Belanja modal tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instansi, jaringan, bangunan gedung dan lainnya.

Belanja dapat dikelompokkan menurut ruang lingkup ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, dan Transfer.

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Sodik (2007:47) Mengatakan bahwa adanya pengaruh positif dan yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan

pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

2.7. Hubungan PAD dan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Brata 2004:72).

2.8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah dalam perumusan masalah maka peneliti mengambil contoh penelitian sebelumnya.

NO.	Judul	Peneliti	Hasil
1.	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005	Bambang Prisaroyo	Dalam penelitian ini adalah PDRB Sektoral Kabupaten Pati dan Jawa Tengah yang dihitung berdasarkan harga konstan. Adapun sampel penelitian ini adalah PDRB atas harga konstan dari tahun 2000-2005. Dan berdasarkan hasil analisis location quotient sektor-sektor potensial yang dapat diandalkan selama tahun analisis adalah sektor pertanian, sektor listrik, sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa

			perusahaan.
2.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Zuwesty Eka Putri	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota provinsi jawa tengah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah.
3.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Stunami, 2010-2014.	Hewi Susanti, dkk	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pemerintah aceh perlu terus menggali sumber-sumber baru potensi PAD dalam rangka peningkatan jumlah PAD provinsi aceh dimasa yang akan datang. Dengan didapatannya sumber-sumber baru potensi PAD diharapkan kedepan pemerintah aceh lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat diambil suatu hipotesa, antara lain:

1. Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.
2. Diduga terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.
3. Diduga besar variabel mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru.